

PEMBERDAYAAN KELOMPOK NELAYAN DI KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Rio Stefanus Tanggara
NPP. 31.0637

*Asdaf Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: riostefanust@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): Pulang Pisau Regency is one of the regions with promising fisheries production. However, this potential has yet to be maximised by the fishing community, and empowerment is one of the ways to do this. **Purpose:** This study aims to determine how empowerment is implemented for fishermen groups in Pulang Pisau Regency. **Method:** The method used is descriptive qualitative research using empowerment theory that looks at aspects of human development, business development, environmental development, and institutional development. **Result:** The results showed that the aspects of business development and institutional development have been empowered well, while the aspects of human development and environmental development have not been optimally implemented. There are several obstacles that cause empowerment to not be carried out optimally, namely budget limitations, limited human resources, and weak law enforcement for violations that occur related to the fisheries sector in Pulang Pisau Regency. Suggestions to overcome some of the obstacles to empowerment found in this study include finding and optimising sources of financing other than the regional budget, empowering fishermen's groups as extension actors in the field, and empowering the community as law enforcers and reminders of fellow communities who still violate applicable regulations. **Conclusion:** The aspects of business development and institutional development have been implemented optimally while the aspects of human development and environmental development have not been optimal due to budget constraints, limited human resources, and weak law enforcement.

Keywords: *Empowerment, Fisheries, Regional Government.*

ABSTRAK

Permasalahan: Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu daerah dengan produksi sektor perikanan yang menjanjikan. Namun potensi yang ada tersebut belum mampu untuk dimaksimalkan oleh Masyarakat Nelayan yang salah satu upayanya adalah dilaksanakan dengan pemberdayaan. **Tujuan:** Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilaksanakan kepada kelompok nelayan di Kabupaten Pulang Pisau. **Metode:** Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pemberdayaan yang melihat aspek bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek bina usaha dan bina kelembagaan sudah diberdayakan dengan baik sedangkan pada aspek bina manusia dan bina lingkungan belum optimal dijalankan. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pemberdayaan belum dijalankan secara optimal

yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan sumberdaya manusia, serta masih lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan bidang perikanan di Kabupaten Pulang Pisau. Saran untuk mengatasi beberapa kendala dalam pemberdayaan yang ditemukan dalam penelitian ini berupa mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan selain anggaran daerah, memberdayakan kelompok nelayan sebagai aktor penyuluh dilapangan, serta memberdayakan masyarakat sebagai penegak hukum dan pengingat sesama masyarakat yang masih melanggar peraturan yang berlaku. **Kesimpulan:**Aspek bina usaha dan bina kelembagaan sudah dilaksanakan dengan optimal sedangkan aspek bina manusia dan bina lingkungan belum optimal yang disebabkan keterbatasan anggaran, keterbatasan sumberdaya manusia, serta masih lemahnya penegakan hukum.

Kata kunci: Pemberdayaan, Perikanan, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satu sumber daya alamnya yang melimpah adalah sektor kelautan dan perikanan. Pengelolaan secara tepat dan konsisten terhadap potensi sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang kita miliki akan mampu memberikan kesejahteraan sosial pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di kawasan pesisir. Potensi sumberdaya kemaritiman nasional tersebut merupakan basis untuk mengembangkan beragam aktivitas ekonomi, sehingga kawasan pesisir merupakan salah satu kawasan yang potensial untuk menunjang keberlanjutan pembangunan nasional. Berdasarkan letak geografisnya, desa pesisir menghubungkan antara daratan dan laut(an), merupakan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan budidaya ikan, udang, dan jenis binatang laut lainnya (Syaputra, 2021). Untuk melakukan budidaya tersebut diperlukan pembuatan tambak atau kolam sesuai dengan jenis budidaya yang akan dilakukan.

Sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia memiliki lembaga kementerian yang bertugas menyusun perencanaan dalam mengelola sumber daya tersebut yang telah diatur dalam undang-undang No 22 Tahun 2021 (Windasai & Hayat, 2021). Di Indonesia sendiri memiliki banyak kawasan perairan yang sangat luas di berbagai daerah provinsi. Oleh karena itu untuk membantu melaksanakan tugas lembaga kementerian maka dibentuk suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana tugas dalam mengelola sumber daya perikanan dan kelautan di daerah masing-masing. Salah satu OPD yang membantu mengelola tugas tersebut yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang berpotensi di Indonesia. Berikut adalah tabel tentang hasil produksi perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 1
Hasil Produksi Perikanan Kalimantan Tengah

Jenis Produksi	Tahun (ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan tangkap	149.725	154.286	151.510	159.610	160.156
Perikanan budidaya	101.857	116.729	120.935	124.624	128.285
Perikanan olahan	6.643	15.097	36.033	45.551	48.861

Sumber: (BPS, 2022), diolah Penulis

Dari tabel 1.2 dapat di lihat bahwa produksi perikanan tangkap di Kalimantan tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini serupa dengan produksi perikanan budidaya, dimana dari tahun 2017 hingga 2023, produksi perikanan budidaya di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan. Namun pada perikanan olahan sempat didapati penurunan, dimana pada tahun 2017, angka produksi perikanan olahan di Kalimantan Tengah adalah 9.316,89 ton. Angka ini menurun sebanyak 3.015,28 ton. Dimana jumlah produksi perikanan olahan tahun 2018 hanya sebesar 6.301,61 ton. Pada tahun 2019 produksi perikanan olahan meningkat kembali sebanyak 342,34 ton. Namun secara mengejutkan, pada tahun 2020, produksi perikanan olahan Kalimantan tengah sebesar 15.097,94 ton, dimana produksi perikanan olahan naik drastis mencapai angka 8.453,99. Dan pada tahun 2021 kembali meningkat sebanyak 20.935,33. Dari hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi perikanan olahan terus meningkat pada saat pandemic Covid-19.

Kabupaten Pulang Pisau sendiri memiliki potensi perikanan yang bagus dan juga banyak menjadi mata pencarian nelayan local dengan mengandalkan dan memanfaatkan cara-cara terbaru dalam menangkap dan mencari hasil tangkapannya, nelayan sendiri memanfaatkan potensi alam yang berlimpah sehingga dengan adanya potensi alam yang berlimpah dapat dirasakan nelayan local langsung dengan hasil tangkap yang berlimpah juga. Cukup banyak masyarakat yang menjadi nelayan lokal dengan jumlah 3.222 orang tergabung dari beberapa kelompok dan masyarakat yang bekerja sama dalam tujuan menangkap dan mencari penghasilan di laut, dalam maksud mencari mata pencaharian sehari-hari demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Yuptriani et al., 2020). Dengan potensi yang ada dinas perikanan kabupaten pulang pisau, mendukung dan memberi fasilitas yang merupakan tujuan adanya peran pemerintah sendiri demi memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan ataupun mata pencaharian sehari-harinya demi memenuhi kebutuhan hidup. Data produksi perikanan di Kabupaten Palung Pisau pada tahun 2017 hingga 2023, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Produksi Perikanan Kabupaten Palung Pisau Pada Tahun 2017 s/d 2023

Tahun	Perikanan Tangkap (dalam Ton)	Perikanan Budidaya (dalam Ton)
2017	19.121,32 ton	4.372,67 ton
2018	19.163,00 ton	4.374,00 ton
2019	19.205,05 ton	4.384,16 ton
2020	19.542,47 ton	4.390,31 ton
2021	19.657,73 ton	4.395,65 ton
2022	19.765,44 ton	4.398,76 ton
2023	19.851,32 ton	4.399,41 ton

Sumber : (BPS, 2022), diolah Penulis

Dari data di atas, dapat di lihat bahwa produksi perikanan di Kabupaten Pulang Pisau dari tahun 2017 hingga 2023 terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa potensi perikanan di Kabupaten Pulang Pisau stabil walaupun peningkatannya tidak terlalu tinggi setiap tahunnya, baik dalam produksi ikan tangkap maupun produksi ikan budidaya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil

Berkaitan kembali terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas perikanan sendiri bertujuan membantu masyarakat pesisir yang tak memiliki pekerjaan ataupun tidak memiliki penghasilan yang tetap, di karenakan tidak memiliki keahlian dan juga kemampuan untuk bekerja maupun bersaing dalam berbagai bidang yang mana di jaman yang modern ini, persaingan menjadi kunci utama dalam mencari pekerjaan maupun pendapatan yang tetap di sebuah tempat pekerjaan maupun

lapangan pekerjaan. Pemberdayaan kelompok nelayan dengan pemberian sarana dan prasarana tepat dilakukan, agar para nelayan memiliki skill tambahan dalam bersaing dan menghadapi pasar global. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang nantinya juga berdampak pada pendapatan negara. Pemberdayaan kelompok nelayan berupa pemberian sarana dan prasarana juga membantu nelayan untuk lebih mudah bersaing dengan pasar besar dengan pengetahuan modern sehingga kelompok nelayan menjadi lebih modern dan mengenal persaingan secara global (Yuptriani et. Al, 2020).

Dari uraian panjang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu “Pemerdayaan Kelompok Nelayan Di Kabupaten Pulang Pisau”. Adapun ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut adalah untuk menelaah lebih lanjut program pemberdayaan kelompok nelayan melalui program-program yang diputuskan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penelitian ini. Penelitian pertama dari (Suryana & Bahari, 2019) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan itu terdiri atas beberapa indikator yang memang harus diperhatikan yaitu bentuk program yang dilaksanakan, partisipasi penerima, kerjasama, peran fasilitator, monitoring dan evaluasi program. Selain itu, Output program pemberdayaan terdiri dari manfaat fisik, manfaat non fisik dan pendapatan. Penelitian selanjutnya dari (Suwandi & Prihatin, 2020) menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat nelayan yang mandiri maka terdapat tiga langkah dalam pemberdayaan yaitu meningkatkan kesadaran anggota akan potensi yang dimiliki dan betapa pentingnya terus bergerak bersama sebagai sebuah kelompok, meningkatkan kapasitas anggota melalui penyelenggaraan pelatihan- pelatihan yang mendukung aktivitas nelayan dan keluarganya, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok serta memberdayakan anggota dengan berfokus pada peningkatan kemandirian, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Aspek terkecil dalam pelaksanaan perekonomian masyarakat seperti koperasi menjadi mitra bagi pemerintah dalam pembangunan.

Selanjutnya, Aspek penting dalam pelaksanaan pemberdayaan dalam Penelitian (Dewi & Dadiara, 2022) setidaknya terdapat 3 hal yaitu pembinaan bagi individu, pembinaan bagi usaha, serta pembinaan bagi kelembagaan. Dalam implementasi pemberdayaan bagi masyarakat sektor perikanan atau nelayan maka terdapat setidaknya 3 tahapan yang perlu diperhatikan menurut (Rahmat, 2022) tahapan tersebut adalah tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, serta tahapan pendayaan. Terakhir, Penelitian dari (Mamentu et al, 2023) menunjukkan bahwa terdapat perubahan sosial ekonomi pada sektor masyarakat nelayan yang disebabkan adanya nepotisme dalam pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Beberapa penelitian tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini dan akan dikembangkan dengan menggunakan teori serta lokus yang baru sehingga novelty dari penelitian akan didapatkan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Melalui artikel ini maka penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan pada sektor masyarakat nelayan yang menggunakan kerangka teori pemberdayaan dari (Mardikanto, 2013). Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan 3 indikator dalam pelaksanaan pemberdayaan, teori pemberdayaan menurut (Mardikanto, 2013) menggunakan 4 indikator dalam bagaimana suatu lembaga atau pemerintah melaksanakan pemberdayaan dengan memperhatikan indikator bina usaha, bina manusia, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Selain itu, penelitian ini juga akan dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang tentunya berbeda dengan beberapa penelitian atau judul yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

1.5 Tujuan

Dari latar belakang serta permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kelompok nelayan melalui program kegiatan bantuan serta untuk hambatan pemberdayaan kelompok nelayan melalui program kegiatan bantuan di Kabupaten Pulang Pisau.

II. METODE

Pendekatan penelitian kualitatif yang diterapkan dalam studi ini merupakan metode ilmiah yang umumnya digunakan oleh peneliti di bidang ilmu sosial, termasuk ilmu pendidikan. Keputusan untuk menggunakan penelitian kualitatif didasarkan pada beberapa alasan, yang intinya adalah kontribusi berharga yang dapat diberikan oleh penelitian ini untuk memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif bertujuan membangun pengetahuan melalui pemahaman mendalam dan penemuan (Sugiyono, 2019). Fokus pada pemahaman mendalam memungkinkan penelitian kualitatif untuk menggambarkan nuansa dan kompleksitas masalah atau fenomena tertentu. Dengan menganalisis pandangan, kata-kata, dan situasi secara mendalam, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih dalam terkait pemberdayaan nelayan dan peran pemerintah daerah (Arikunto, 2013).

Ruang lingkup dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berbicara tentang pemberdayaan yang menurut (Mardikanto, 2013) setidaknya terdiri atas 5 dimensi yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, serta Bina Kelembagaan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dengan memadukan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, serta studi dokumen yang tentunya berkaitan dengan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di Kabupaten Pulang Pisau (Ghani, 2014). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlanjut terus-menerus hingga data mencapai tingkat kejenuhan. Kegiatan analisis data ini mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaan penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini yang berjudul “Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Bantuan Di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah”. Merujuk pada teori, maka setidaknya terdapat 4 dimensi yang diteliti dalam penelitian ini. Dimensi tentang pemberdayaan tersebut adalah tentang bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, serta bina kelembagaan.

3.1 Bina Manusia

Dimensi bina manusia selanjutnya menjadi penting dalam pelaksanaan pemberdayaan karena tentunya pelaksanaan kegiatan itu sendiri dilaksanakan oleh manusia sebagai aktor pelaksana kegiatan. Terdapat 2 indikator dari dimensi bina manusia yang diteliti pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana upaya dalam peningkatan Kapasitas SDM Perikanan di Kabupaten Pulang Pisau serta upaya dalam wujud pemberian pelatihan dan materi. Berikut adalah pembahasannya:

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sudah sadar bahwa peningkatan kapasitas SDM penyelenggaran perikanan merupakan aspek dan hal fundamental yang harus diperhatikan demi terlaksanakan urusan perikanan yang efektif dan dapat mensejahterakan masyarakat. Peningkatan Kapasitas SDM sudah menjadi salah satu program yang terdaftar dalam program kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau. Anggaran terbesar dalam program pengelolaan perikanan ada pada penyediaan sarana prasarana perikanan tingkat yang mencapai Rp. 2.581.380.000 sedangkan

untuk anggaran pengembangan kapasitas nelayan kecil hanya dianggarkan sebesar Rp.50.000.000 saja. Tentunya dengan keterbatasan anggaran tersebut menandakan bahwa pengembangan kapasitas nelayan belum menjadi prioritas pada 2024.

Selain itu, keterbatasan dari sisi anggaran memang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan upaya peningkatan SDM sektor perikanan di Kabupaten Pulang Pisau tetapi kekurangan tenaga penyuluh juga menjadi salah satu kendala yang hingga saat ini masih dihadapi. Berdasarkan dua keterangan diatas maka Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM di sektor perikanan masih belum optimal disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada serta kekurangan personil sebagai penyuluh dalam pelaksanaan peningkatan SDM dimaksud.

b. Pelatihan dan Pemberian Materi untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia

Selama ini diketahui bahwa pemberian materi dilaksanakan dengan skema penyuluh yang langsung turun ke Lapangan dan langsung memberikan informasi dan pengarahan kepada masyarakat.

Tabel 3
Frekuensi Pelaksanaan Penyuluhan kepada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

No	Bulan	Frekuensi
(1)	(2)	(3)
1	Januari	-
2	Febuari	-
3	Maret	1 kali
4	April	2 kali
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	1 kali
8	Agustus	-
9	September	1 kali
10	Oktober	-
11	November	1 kali
12	Desember	1 kali

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau, diolah (2024)

Sepanjang tahun 2023 kegiatan penyuluhan dilaksanakan hanya 7 kali dalam beberapa bulan dengan metode penyuluhan atau pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang memang turun langsung memberikan informasi kepada Masyarakat Nelayan. Maka, sesuai dengan keterangan masyarakat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa memang metode yang dilaksanakan dalam peningkatan SDM sektor perikanan di Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan oleh penyuluh secara langsung dengan terjun ke Masyarakat yang bergiat pada sektor perikanan. Kembali lagi, kendala pada keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan pelatihan atau pemberian materi yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas SDM belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.

3.2 Bina Usaha

Dimensi ini memiliki 2 indikator yaitu Pembinaan dan pelatihan usaha serta pemberian dan pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan usaha masyarakat. Berikut adalah pembahasannya:

a. Pembinaan dan Pelatihan

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Perikanan berupaya untuk melaksanakan pembinaan dan pelatihan dengan tujuan memberdayakan masyarakat yang bergiat disektor perikanan agar dapat memaksimalkan kegiatan usahanya masing-masing. Berdasarkan data, maka dapat diketahui jika pelaksanaan pemberdayaan bidang usaha masyarakat di sektor perikanan sudah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan tanda kepemilikan yang jelas yang dapat digunakan untuk mendapatkan akses atas permodalan yang lebih luas dan memungkinkan kegiatan usaha masyarakat semakin meningkat. Berdasarkan keterangan diatas maka sudah dapat disimpulkan bahwa program pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dalam peningkatan kegiatan usaha menjadi prioritas dari Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau. Penulis juga mewawancarai masyarakat nelayan dalam menilai tentang bagaimana kegiatan pelatihan dan pembinaan sektor usaha bagi masyarakat nelayan sudah dirasakan.

Dari beberapa keterangan dan data tentang pelatihan dan pembinaan bidang usaha oleh Dinas Perikanan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bidang usaha bagi Masyarakat nelayan di Kabupaten Pulang Pisau sudah dilaksanakan dan sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang menjadi target dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan tersebut.

b. Pemberian dan Pengembangan Sarana Prasarana

Selain pemberian pelatihan dan juga pembinaan dalam upaya meningkatkan usaha masyarakat nelayan di Kabupaten Pulang Pisau, indikator kedua dalam dimensi bina usaha yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang pemberian dan pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan usaha. Diketahui bahwa setiap tahun pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana merupakan hal yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau. Untuk mendukung keterangan tersebut maka berikut ini adalah salah satu program pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau untuk kelompok masyarakat nelayan:

Tabel 4. 1

Program Pemberian dan Pengembangan Sarana Prasarana bagi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

1	Nama Program	Pengelolaan Perikanan Tangkap
2	Kegiatan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota (Sosialisasi Program Konversi BBM ke BBG untuk Kapal Nelayan Kecil)
3	Anggaran	Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4	Target	Nelayan Penerima Bantuan Paket Konversi BBM ke BBG
5	Output	Nelayan mendapatkan informasi dan pengetahuan serta pemahaman yang baik mengenai manfaat konversi BBM ke BBG untuk menekan biaya operasional nelayan
6	Pelaksana	Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau, diolah Penulis (2024)

Berdasarkan data yang terlampir pada tabel 4.10 diatas maka dapat diketahui bahwa program pemberian dan pengembangan sarana dan prasarana bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Pulang Pisau sudah dilaksanakan dengan target dan output yang memang jelas.

Berdasarkan pada beberapa keterangan dan data terkait pemberian dan pengembangan sarana dan prasarana bagi Masyarakat nelayan dalam rangka bina usaha di Kabupaten Pulang Pisau oleh Dinas Perikanan sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan masyarakat nelayan yang memang mengapresiasi dan menunggu program-program serupa lainnya di masa yang akan datang.

3.3 Bina Lingkungan

Terdapat 2 (dua) indikator dalam dimensi lingkungan ini yang pertama adalah pembinaan Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan yang kedua adalah Bimbingan Pengelolaan Limbah dan Dampak Lingkungan. Berikut adalah pembahasan kedua indikator dalam dimensi bina lingkungan:

a. Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan

Masih terdapat beberapa oknum masyarakat nelayan yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di Kabupaten Pulang Pisau. Maka dari itu, Peran Pemerintah selanjutnya menjadi krusial dalam menjaga dan memastikan seluruh masyarakat patuh dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan serta tentunya tidak merusak dan membahayakan lingkungan. Diketahui bahwa sudah ada upaya berupa penyuluhan dan himbauan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat nelayan agar tidak membahayakan lingkungan dalam melaksanakan kegiatan perikanan mereka. Tetapi dari keterangan itu juga dapat diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan tersebut tidak efektif yang ditandai dengan tetap diterimanya aduan dan laporan terkait oknum masyarakat nelayan yang melanggar ketentuan lingkungan yang sudah diterapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan beberapa keterangan dan data diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan lingkungan melalui pelestarian dan pemanfaatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau masih belum optimal sekalipun mayoritas masyarakatnya sudah menjalankan kegiatan perikanan dengan sesuai ketentuan lingkungan. Dengan masih adanya oknum-oknum dan tidak adanya tindakan tegas dari Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah tersebut. Keterbatasan anggaran kembali menjadi kendala sekalipun fungsi pengawasan atas oknum masyarakat yang melanggar ketentuan lingkungan di Kabupaten Pulang Pisau.

b. Bimbingan Pengelolaan Limbah dan Dampak Negatif Lingkungan

Indikator kedua dalam pemberdayaan pada lingkungan adalah tentang bagaimana bimbingan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka pengelolaan limbah dan dampak negatif yang terjadi. Berdasarkan keterangan dari pelaksanaan penelitian, Penulis berpendapat bahwa sejauh ini belum ada upaya apapun terkait bimbingan dalam pengelolaan limbah dan dampak negatif pada lingkungan dari pelaksanaan kegiatan usaha di sektor perikanan yang dilaksanakan oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Pulang Pisau. pembimbingan tentang pengelolaan limbah dan pengurangan dampak negatif atas lingkungan bukan menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Memang dari beberapa keterangan wawancara sebelumnya, Dinas Perikanan sudah menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam bidang perikanan dan kelautan. Hal itu pada akhirnya berimplikasi pada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya ditentukan berdasarkan skala prioritas yang sudah disetujui bersama dalam dokumen perencanaan dan tentunya teranggarkan dalam anggaran Dinas Perikanan.

Berdasarkan keterangan tersebut menandakan bahwa kesadaran atas lingkungan sudah mulai ada di tengah masyarakat nelayan di Kabupaten Pulang Pisau. Namun tentu Pemerintah perlu untuk memberikan pembinaan tentang bagaimana mengolah dan mengurangi dampak negatif

atas lingkungan jika memang diperlukan. Berdasarkan beberapa keterangan dan data dari penelitian yang dilaksanakan maka Penulis menyimpulkan bahwa pembinaan untuk pengelolaan limbah dan pengurangan dampak negatif pada lingkungan di Kabupaten Pulang Pisau belum dilaksanakan ataupun belum menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang ada.

3.4 Bina Kelembagaan

Pada dimensi bina kelembagaan ini terdapat dua indikator yang menjadi bahan penelitian yaitu penguatan kelembagaan serta penguatan pengelolaan badan usaha daerah. Berikut adalah pembahasannya:

a. Penguatan Kelembagaan

Penguatan lembaga menjadi salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Pulang Pisau. Kelembagaan masyarakat yang berkaitan dengan perikanan tentunya menjadi penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan bidang perikanan itu sendiri dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat nelayan. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan beberapa skema seperti kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah lain ataupun skema lainnya. Terdapat beberapa upaya yang telah dilaksanakan. Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan di Kabupaten Pulang Pisau sudah dilaksanakan dan masuk kedalam salah satu aspek yang sedang diperhatikan. Pemerintah Daerah sudah menyadari bahwa aspek kelembagaan itu penting sehingga Koperasi dan BUMDes yang selama ini berjalan tidak terlalu optimal mulai dibenahi dan diperhatikan.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan lembaga milik masyarakat nelayan dalam pengolahan produk perikanan mereka agar semakin optimal. Aspek daftar usaha, mutu serta keamanan hasil perikanan, serta pemberian beberapa bantuan bahan baku dilakukan Dinas Perikanan untuk memberdayakan masyarakat nelayan di Kabupaten Pulang Pisau agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu, Penulis menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan di Kabupaten Pulang Pisau oleh Dinas Perikanan sudah dijalankan dengan baik dan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.

b. Penguatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

Pengelolaan badan usaha daerah yang dalam hal ini berkaitan dengan bidang perikanan tentunya sama pentingnya seperti penguatan kelembagaan yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya. Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau sudah berupaya untuk melakukan penguatan pengelolaan badan usaha daerah dengan beberapa kegiatan dan program yang sudah dilaksanakan. Berikut adalah dokumentasi dari salah satu program atau kegiatan yang ditujukan untuk penguatan pengelolaan badan usaha milik daerah di Kabupaten Pulang Pisau:



Gambar 1
Bimbingan Teknis dalam Peningkatan Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau (2024)

Kegiatan pada gambar diatas merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan pengelolaan badan usaha daerah oleh Dinas Perikanan. Berdasarkan keterangan diatas maka penguatan pengelolaan badan usaha daerah sudah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau. Memperkuat data dan keterangan tentang pemberdayaan pada aspek penguatan pengelolaan badan usaha daerah maka dapat diketahui jika pelaksanaan pemberdayaan penguatan pengelolaan badan usaha di Kabupaten Pulang Pisau sudah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dengan menggunakan skema kerjasama sehingga keterbatasan anggaran yang selama ini menjadi masalah utama dalam pemberdayaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan beberapa keterangan diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan penguatan pengelolaan badan usaha di Kabupaten Pulang Pisau sudah dilaksanakan dengan baik.

3.5 Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau diteliti dalam penelitian ini. Setelah beberapa data dan keterangan yang didapatkan selama penelitian, peneliti mengidentifikasi setidaknya beberapa permasalahan yang menjadi penyebab dan menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Pulang Pisau.

a. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan ketersediaan anggaran menjadi salah satu kendala dan penyebab utama dalam belum optimalnya pemberdayaan kelompok nelayan di Kabupaten Pulang Pisau. Dimensi bina Manusia yang terdiri dari indikator pelatihan dan pemberian materi kepada Masyarakat Nelayan belum optimal serta dimensi lingkungan yang berisikan indikator pemberian pembinaan pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan belum optimal dijalankan. Kendati menjadi kendala, Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau tetap berupaya untuk tetap melakukan pemberdayaan dengan optimal dengan menetapkan skala prioritas dan melakukan kegiatan dan program melalui konsep dan skema kerjasama.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Selain anggaran yang ketersediaannya terbatas, sumber daya manusia di Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang terbatas juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan. Sumber Daya Manusia yang salah satunya ditugaskan menjadi penyuluh bagi pelaksanaan dan penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi krusial dalam rangka melakukan pemberdayaan sehingga dengan jumlah yang terbatas maka pemberdayaan yang dilakukan juga menjadi terbatas. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau berkomitmen untuk memaksimalkan segala sumberdaya yang ada ditengah keterbatasan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan. Bentuk optimalisasi ditengah keterbatasan tersebut diwujudkan dalam mengajak serta masyarakat dan LSM untuk turut andil dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.

c. Masih Rendahnya Penegakan Hukum

Kendati secara mayoritas masyarakat sudah taat dan menjalankan aktivitas di bidang perikanan dengan sesuai ketentuan dan peraturan tetapi masih ditemukan beberapa oknum masyarakat yang masih melanggar. Dari keterangan diatas maka dapat diketahui jika Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau memang mengakui bahwa penegakan hukum masih kurang berjalan optimal. Kendala dalam penegakan hukum itu sudah diupayakan untuk diatasi dengan turut serta mengajak dan memberdayakan masyarakat nelayan untuk sama-sama mengingatkan sesamanya yang masih menjadi oknum pelanggar dalam pelaksanaan kegiatan di sektor perikanan di Kabupaten Pulang Pisau.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Secara garis besar, dari total 4 indikator yang diteliti dalam pelaksanaan pemberdayaan yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 2 indikator yaitu bina usaha dan bina kelembagaan sudah dilaksanakan dengan optimal sedangkan 2 indikator lainnya yaitu bina manusia dan bina lingkungan belum dilaksanakan dengan optimal. Indikator yang belum optimal harus sesegera mungkin diatasi dengan kembali memperhatikan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Bina kelembagaan menjadi penting dalam hal ini karena apabila merujuk pada penelitian dari (Suryana & Bahari, 2019) maka disebutkan bahwa peran fasilitator, monitoring dan evaluasi program itu adalah indikator yang perlu diperhatikan sehingga bina kelembagaan selaku penyedia fasilitas dan yang berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi. Penelitian (Dewi & Dadiara, 2022) juga menyebutkan bahwa indikator pembinaan bagi individu, pembinaan bagi usaha, serta pembinaan bagi kelembagaan itu merupakan aspek yang penting, maka apabila merujuk pada hasil penelitian didapatkan bahwa 2 dari indikator tersebut sudah berjalan dengan optimal dan hanya bina kelembagaan saja yang belum optimal.

Bentuk pembinaan yang dilaksanakan dalam 4 indikator yang diteliti pada penelitian ini harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disebutkan oleh (Suwandi & Prihatin, 2020) menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat nelayan yang mandiri maka terdapat tiga langkah dalam pemberdayaan yaitu meningkatkan kesadaran anggota akan potensi yang dimiliki, meningkatkan kapasitas anggota melalui penyelenggaraan pelatihan- pelatihan yang mendukung aktivitas nelayan dan keluarganya, serta memberdayakan anggota dengan berfokus pada peningkatan kemandirian, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kedepannya, hasil dari penelitian ini agar dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek atau tahapan yang menjadi fokus dalam penelitian (Rahmat, 2022) yang terdiri atas tahapan tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, serta tahapan pendayaan bagi masyarakat nelayan Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu, hambatan dalam penelitian (Mamentu et al, 2023) menekankan bahwa potensi

nepotisme dalam pelaksanaan dari kebijakan dapat menjadi hambatan fatal dalam pelaksanaan pemberdayaan.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau diteliti dengan memperhatikan 4 dimensi yaitu dimensi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, serta bina kelembagaan. Bina manusia melalui pelatihan dan pemberian materi untuk peningkatan SDM belum terlaksana secara optimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan penyuluh (pegawai) dari Dinas Perikanan. Dimensi Bina usaha sudah dilaksanakan karena memang diprioritaskan ditengah keadaan dan keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau. Dimensi ketiga yaitu bina lingkungan juga belum terlalu menjadi perhatian dari Dinas Perikanan karena belum terlalu di prioritaskan dan tentunya keterbatasan anggaran yang ada. Terakhir adalah dimensi kelembagaan yang diperhatikan dan diberdayakan dengan baik ditengah keterbatasan yang ada dengan memanfaatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dengan Pusat atau pihak lainnya. Secara ringkas, dalam apa yang telah dilakukan Dinas Perikanan kepada masyarakat nelayan baru dioptimalkan pada dimensi bina usaha serta bina kelembagaan, sedangkan untuk bina manusia dan bina lingkungan masih belum diprioritaskan dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dimiliki.

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan yang optimal bagi kelompok masyarakat nelayan di Kabupaten Pulang Pisau oleh Dinas Perikanan. Pertama, anggaran pada peningkatan sumber daya manusia, pembinaan sektor lingkungan, dan pembinaan dalam penguatan kelembagaan sangat terbatas apabila dibandingkan dengan pembinaan usaha yang dilakukan melalui pengadaan dan pemberian bantuan sarana prasarana yang dianggarkan sangat besar. Kedua, keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat maupun mengawasi dan menegakan peraturan di bidang perikanan di Kabupaten Pulang Pisau. Hambatan ketiga adalah tentang Masih Rendahnya Penegakan Hukum oleh Dinas Perikanan yang ditandai dengan masih adanya oknum-oknum masyarakat nelayan yang masih menggunakan cara menangkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak menuruti peraturan tentang pelestarian lingkungan yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian. Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup dan jangka waktu pelaksanaan penelitian yang tentu tidak mampu untuk mengupas secara mendalam tentang penyebab ataupun solusi yang holistik dalam pelaksanaan pemberdayaan dan mengatasi permasalahan yang mungkin dapat ditemui. **Arah Masa Depan Penelitian.** Harapannya kedepannya penelitian ini akan dapat dilanjutkan dengan mengembangkan teori dan pembahasan yang digunakan dalam lingkup pemberdayaan masyarakat secara umum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Terutama bagi Orang Tua, Dosen Pembimbing, Penguji, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Sasuh Bimbingan, serta seluruh pihak yang terkait.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta.
- Ghani, A. A. (2014). *Metode Penelitian Tindakan Sekolah*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Syaputra, M. (2021). *Peran Modal Sosial Kelompok Nelayan Menghadapi Cuaca Buruk di Pesisir Pantai Desa Kuranji Dalang*. X.
- Bps. (2022). *Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2017 S/D 2022*. Bps Kalimantan Tengah.
- Dewi, M. F., & Dadiara, F. S. (2022). *Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (Skpt)*. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, 7(2017), 82– 100.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mamentu, M., Rares, J. J., & Isa, R. (2023). *Fisherman Empowerment Program In Talaud Islands*. *Public Policy Journal Volume*, 4(1), 35–44.
- Rahmat, R. (2022). *Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal*.
- Suryana, N. K., & Bahari, S. (2019). *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Nelayan Minapolitan Desa Tideng Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung)*. *Jurnal Ilmu Pertanian*, 2(2), 1–9.
- Suwandi, M. A., & Prihatin, S. D. (2020). *Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” Di Jepara, Indonesia*. *Jispo (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 10(2), 231–255. <https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Jispo/Article/View/9451>
- Windasai, Said, M. M., & Hayat. (2021). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 6(1), 1–13.
- Yuptriani, Rizall, M., & Prasetyo, A. (2020). *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rawa Gambut Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Tanjung Taruna Kabupaten Pulang Pisau*. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2.